BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia saat ini sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur serta merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan masyarakat berhubungan erat dengan peningkatan standar hidup dan kualitas hidup yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional. Pembangunan ekonomi di Indonesia perlu dilakukan di setiap daerah.

Pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi *(economic growth*) yang ditunjukkan oleh pertambahan produksi atau pendapatan nasional. Keberhasilan pembangunan akan dapat mempertinggi kemampuan bangsa dalam perubahan di bidang lainnya. Salah satu tujuan pembangunan jangka panjang bidang pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya stabilitas ekonomi di bidang pertanian dan industri. (Aditia, 2010:8)

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah suatu proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang. Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa, sehingga sumber daya daerah berpotensi menghasilkan pendapatan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah tersebut. Sumber daya daerah yang merupakan potensi ekonomi harus dikembangkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di daerah. (Limbong, 2009)

Ekonomi suatu daerah baik itu Kabupaten maupun Kota yang berlangsung di Indonesia berjalan terus menerus dan tiap daerah tersebut berusaha untuk memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan wilayahnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah diharapkan akan terus memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat. Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegitan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. **(Arsyad, 1999:108)**

Pembangunan daerah memerlukan tenaga kerja sebagai salah satu modal utama sebab tenaga kerja merupakan sumber daya dominan baik dilihat dari segi kegiatan produksi maupun dari sisi pemanfaatan hasil- hasil pembangunan tenaga kerja diharapkan mempunyai kualitas untuk menjamin tingkat produktivitas yang tinggi dan pekerja harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar mereka memperoleh hak- haknya, baik sebagai pekerja maupun memenuhi peran sebagai

anggota masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, berkaitan erat dengan jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat pula. Jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja menandakan bahwa pembangunan di suatu daerah belum berjalan secara efektif. (Andrew Lahama, 2018)

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut sehingga mendorong penggunaan sumberdaya yang efisien. Pembangunan ekonomi daerah juga dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan sumber daya yang tidak memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat dan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama untuk berinisiatif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada daerah tersebut secara optimal agar mampu membangun perekonomian daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah. (Purwanti, 2009)

Secara umum dapat dikatakan bahwa regionalisasi kegiatan ekonomi berhubungan erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi dan perubahan peranan berbagai kegiatan itu dalam keseluruhan kegiatan ekonomi. Berkaitan hal

tersebut, maka analisis perkembangan pembangunan suatu daerah, semakin kecil suatu wilayah akan semakin mudah dalam mengidentifikasi berbagai masalah dan sumber- sumber potensialnya, sehingga akan memudahkan dalam penyusunan rencana secara komperhensif dan semakin mudah untuk menetapkan saran- saran yang ingin dicapai. Ada tujuh belas sektor ekonomi atau kelompok lapangan usaha yang umumnya dapat dihitung dalam PDB dan PDRB jika dalam lingkup regional/ daerah. Adapun tujuh belas sektor tersebut yaitu :

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan listrik, dan gas
5. Pengadaan air
6. Konstruksi
7. Perdagangan, hotel dan restaurant
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan
12. *Real Estate*
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan dan pertahanan
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

17. Jasa lainnya (Anonim, 2004 : 12)

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah. Faktor tenaga kerja sangat menentukan kesejahteraan suatu daerah. Selain itu kualitas tenaga kerja juga sangat berpengaruh dalam peningkatan nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban sebagai obyek penelitian. Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban memiliki beberapa sektor unggul yang berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengidentifikasi lebih lanjut tentang **"ANALISIS SEKTOR BASIS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN BOJONEGORO DAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sektor basis di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?
2. Apakah ada penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor basis di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
2. Mengetahui penyerapan tenaga kerja pada sektor basis di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai langkah awal penerapan ilmu pengetahuan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah daerah, sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi daerah dimasa yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk melengkapi kekurangan- kekurangan dalam penelitian ini.